

Gerakan Separatis dan Dampaknya Terhadap Pengembangan Demokrasi

Bambang Cipto

A long Asia continent, from Turk, Indonesia, up to Papua New Guinea, believed as the fertile land for the seeds of separatism. The keywords for such problem is actually the injustice. Means, injustice between majority and minority, also, injustice between big countries and the small ones. The solution needed is, democratization in the mean of the ability of the government to accommodate the needs of all people. When the attention of the government is only addressed for particular group of people, the spirit for separatisms is absolutely cannot be extinguished.

Gerakan separatis atau gerakan memisahkan diri yang dilakukan sebuah komunitas dari sebuah bangsa merupakan gejala universal yang sudah cukup lama berkembang. Di beberapa negara gerakan separatis berhasil membentuk sebuah negara baru. Sementara di sebagian besar negara gerakan separatis tak pernah mampu berkembang lebih luas dan kemudian berkembang menjadi gajalan bagi pertumbuhan dan perkembangan demokrasi negara bersangkutan.

Kawasan Asia Selatan merupakan ladang bagi gejala separatis sesudah Perang Dunia II berakhir. Partisi Pakistan pada tahun 1947 sebenarnya merupakan gerakan separatis komunitas muslim dari komunitas Hindu yang lebih besar dan kuat. Gerakan ini menghasilkan negara Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pakis-

tan Timur sendiri akhirnya juga memisahkan diri menjadi negara baru yang kemudian dikenal sebagai negara Bangladesh.¹

Kawasan Asia dari Turki, Indonesia, hingga Papua Nugini merupakan kawasan sepanjang garis khatulistiwa yang sangat kaya dengan gejala separatis.² Etnis Kurdi hingga kini tetap menjadi persoalan serius bagi pemerintah Turki. Kaum Sikh negara

¹ Craig Baxter, Yogendra K. Malik, Charles H. Kennedy, and Robert C. Oberst, 1986, *Government and Politics in South Asia*, Westview Press.

² Larry Diamond, Juan J. Linz, and Seymour Martin Lipset, 1989, *Democracy in Developing Countries: Asia Volume Three*, Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishes, hal. 18.

bagian Punjab dikenal sebagai kelompok separatis terkemuka di India. Di Indonesia, sejak awal kemerdekaan telah muncul gejala separatis sebagaimana diwujudkan oleh gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Bahkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pun sering dituduh Pemerintah sebagai gerakan separatis. Demikian pula Gerakan Papua Merdeka yang pada masa Suharto disebut sebagai Gerakan Pengacau Keamanan.

Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990 pun menghasilkan gejala pemisahan besar-besaran negara-negara bekas jajahan kemaharajaan Uni Soviet yang kemudian menjelma menjadi negara-negara baru di sekeliling Uni Soviet. Bukan tidak mungkin bahwa peristiwa ambruknya Uni Soviet mendorong terciptanya harapan baru bagi gerakan separatis di berbagai belahan dunia.

Asia: Ladang Gerakan Separatis

Barangkali pengamatan Larry Diamond memang cukup besar berdasar bahwa ladang sekaligus laboratorium hidup gerakan separatis terbesar di dunia berada di kawasan negara-negara Asia. Tajamnya perbedaan etnis, bahasa, agama, dan budaya pada setiap negara Asia sangat berbeda dengan negara-negara Amerika Latin yang pada umumnya menunjukkan tingkat homogenitas yang cukup tinggi (*Latin America stands out for its high degree of cultural and linguistic homogeneity*).³ Perbedaan yang paling menyolok ter-

dapat pada ketimpangan sosial-ekonomi. Namun, perbedaan ini tidak menciptakan polarisasi kehidupan politik dan sosial sebagaimana di kawasan-kawasan yang sangat heterogen.

Asia sebaliknya, merupakan kawasan negara-negara dengan tingkat heterogenitas yang sangat tinggi dan sisa-sisa non-demokratik yang sangat kuat tertanam dalam budayanya. Salah satu negara yang hingga kini dikenal dengan isu gerakan separatis terkemuka adalah India. Sangat ironis, bahwa di satu sisi India dikenal sebagai berkembang yang paling sukses dalam mengembangkan eksperimen demokrasi. Namun, di sisi lain India juga merupakan laboratorium hidup gerakan separatis paling beragam.

Negara dengan penduduk terbesar di dunia kedua, sesudah Cina, sangat memahami betapa berbahaya gerakan separatis bagi kelangsungan hidup sebuah demokrasi. Pengalaman pahit dengan terpisahnya Pakistan dari India membuat negara tempat kelahiran Mahatma Gandhi ini mengklaim dirinya sebagai negara dengan ideologi sekuler. Semangat sekulerisme yang ditancapkan ke dalam konstitusi India dimaksudkan untuk mengikat dan memberi tempat bagi semua kelompok agama ke dalam negara India. Harapannya adalah tak perlu lagi gerakan separatis di India karena semua warganegara dapat menyalurkan tuntutan dan harapan mereka kepada negara India yang sekuler dan tidak membeda-bedakan agama.

Namun, strategi konstitusional ini tidak sepenuhnya benar-benar berhasil mengikat kelompok-kelompok etnis yang tersebar di seluruh India. Sebagai misal, dalam tahun 70-an Pemerintah India menindas gerakan separatis yang dilancarkan suku Naga, yang mayoritas penduduknya

³ Larry Diamond, Juan J. Linz, and Seymour Martin Lipset, 1989. *Democracy in Developing Countries: Asia Volume Four*, Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishes.

beragama Kristen. Sementara itu, gerakan separatis juga mekar di kawasan Timur India yang mengangkat senjata melawan New Delhi. Akan tetapi, gerakan separatis di negara-negara bagian yang kecil dan jauh dari keramaian dunia ini dengan mudah ditaklukkan pemerintah pusat di New Delhi tanpa sempat mendapat ekspos luas oleh media massa internasional.

Akan tetapi gerakan separatis yang paling legendaris adalah gerakan yang berbasis di negara bagian Punjab. Negara bagian ini sangat dikenal dengan hasil-hasil pertanian yang sangat makmur dibanding kawasan lain yang pada umumnya kering. Kaum Sikh yang merupakan mayoritas penduduk Punjab beberapa kali melancarkan perlawanan terhadap New Delhi walaupun tanpa hasil. Salah satu peristiwa yang paling dikenal dalam sejarah gerakan separatis India adalah terbunuhnya Perdana Menteri Indira Gandhi oleh pengawal pribadinya yang berasal dari kaum Sikh.⁴ Kemarahan kaum Sikh memang tidak tertahan lagi karena pasukan federal India menyerbu Kuil Emas yang merupakan pusat kegiatan kaum Sikh. Di samping itu, India juga berhadapan dengan gerakan-gerakan *Maoist di Andhra Pradesh, West Bengal, Assam, dan Bihar*. Dengan kata lain, demokrasi India ternyata kaya dengan gerakan separatis yang sudah barang tentu merongrong pertumbuhan dan perkembangan demokrasi.

Gerakan separatis kedua terbesar

⁴ Stephen P. Cohen and Sumit Ganguly. 1999. "India," dalam *The Pivotal States: A New Framework for U.S. Policy in the Developing World*, diedit oleh Robert Chase, Emily Hill, and Paul Kennedy, New York: W.W. Norton & Company, hal. 44.

berkembang di Turki. Di negeri Kemal Attaturk ini terdapat tidak kurang dari 12 juta Etnis Kurdi atau sekitar 20% dari seluruh penduduk Turki.⁵ Mereka tinggal di kawasan pegunungan Turki bagian selatan. Bahkan jika digabung dengan suku Kurdi yang terhampar di sekitar Iraq, Iran, dan Suriah jumlahnya hampir mencapai 25 juta orang. Sejak Turki moderen dibentuk Attaturk, suku Kurdi yang memiliki bahasa dan budaya yang sangat berbeda dengan mayoritas orang Turki dianggap sebagai ancaman serius bagi proyek besar untuk membangun identitas Turki yang sekuler dan moderen. Oleh karena itu, rejim-rejim Turki sejak awal melarang penggunaan Bahasa Kurdi dan berusaha keras menamakan Turkiisme sebagai identitas kaum Kurdi walaupun tanpa hasil.

Bagi pemerintah Turki persoalan suku Kurdi amatlah serius apalagi jika dikaitkan dengan aspek ekonomi dan militer. Suku Kurdi menuntut pemberlakuan Bahasa dan Budaya Kurdi di kawasan mereka. Bahkan kemudian muncul pula tuntutan kelompok-kelompok garis keras Kurdi. Sementara itu, peperangan yang berlangsung antara pasukan militer Turki dan separatis Kurdi telah menyerap pasukan dan dana dalam jumlah yang sangat besar dan tak pernah diketahui publik.⁶ Padahal kawasan selatan Turki merupakan jalur

⁵ David McDowall. 1992. "The Kurdish Question," dalam *The Kurds: A Contemporary Overview*, diedit oleh P.G. Kreyenbroek and S. Sperl, London and New York: Routledge Press, hal. 32.

⁶ Michael M. Gunter. 1994. *The Changing Kurdish Problem in Turkey*, London, Research Institute for the study of Conflict and Terrorism.

pipa minyak dari Timur Tengah yang sangat menentukan perekonomian nasional. Hingga kini pasukan Turki tak pernah mampu menghentikan gangguan terhadap jalur minyak yang sangat strategis tersebut.

Mengapa Muncul Separatis di India dan Turki?

Mengapa muncul gerakan-gerakan separatis di India dan Turki? Di kedua negara ini persoalan dasarnya adalah faktor primordialisme, yakni, bahasa dan budaya yang berbeda dengan mayoritas penduduk negara bersangkutan. Kaum Sikh di India merupakan kelompok etnis yang sangat berbeda dengan mayoritas penduduk Hindu. Mereka merupakan bentuk sinkretisme antara Hindu dan Islam di masa lalu. Secara kebetulan, kaum Sikh merupakan mayoritas penduduk negara bagian Punjab yang makmur. Tindakan represif aparat militer India terhadap *Kuil Emas Kaum Sikh*; pembunuhan Indira Gandhi sebagai bentuk balas dendam kaum Sikh dan pembantaian massal kaum Sikh di New Delhi dan kota-kota lain menumbuhkan rasa dendam yang tak mudah dipadamkan. Akumulasi kekecewaan inilah yang menumbuhkan semangat separatis kaum Sikh di India yang hingga kini tak kunjung padam. Namun, posisi negara Punjab yang jauh dan laut dan terjepit di tengah wilayah India Utara dan Pakistan membuat harapan untuk mewujudkan impian memiliki negara terpisah sangat sulit diwujudkan. Perhatian internasional terhadap problem Sikh pun pada umumnya sangat minim. Akibatnya, kaum Sikh di India menjadi ancaman laten bagi integrasi dan demokrasi India. Sementara itu, ketidakmampuan India menciptakan kemakmuran yang merata bagi lebih dari satu

milyar penduduknya merupakan problem tersendiri. Aspirasi separatis dengan mudah berkembang dikawasan yang jauh dari New Delhi sebagai akibat rendahnya kemampuan pemerintah menciptakan kemakmuran di seluruh India.

Sementara itu, kaum Kurdi di pegunungan selatan Turki pun pada dasarnya menghadapi persoalan yang kurang lebih sama. Di satu sisi, Kurdi terus-menerus ditindas dengan strategi militer, budaya (pelarangan penggunaan dan pemuliaan dan Bahasa dan Budaya Kurdi), dan ekonomi (boikot suplai makanan oleh pemerintah Turki). Di sisi lain, kawasan tempat tinggal kaum Kurdi merupakan jalur minyak paling dekat dan Timur Tengah ke Turki. Posisi Kurdi yang terdesak tetapi sekaligus strategis ini membuat gerakan separatis Kurdi tetap bertahan hingga kini. Namun, persoalan dasarnya adalah penindasan Bahasa dan Budaya Kurdi oleh pemerintah Turki secara sistematis dan terus-menerus dan menyebabkan jatuhnya korban yang banyak di pihak Kurdi. Semua rasa sakit hati dan dendam yang tidak dihilangkan dari ingatan orang-orang Kurdi khususnya sayap garis keras Kurdi:

Perbedaan bahasa dan budaya sebagai penyebab gerakan separatis tidaklah sepenuhnya benar. Dalam arti bahwa diperlukan faktor lain yang membuat perbedaan tersebut menimbulkan dorongan untuk melakukan gerakan separatis. Banyak etnis yang dapat hidup berdampingan sekalipun mereka berbeda dalam bahasa, budaya, maupun agama. Di berbagai belahan dunia selalu terdapat kelompok minoritas yang berbeda dari kelompok mayoritas. Tidak semua kelompok-kelompok minoritas mengangkat senjata untuk memisahkan diri dari ikatan bangsa yang lebih besar. Namun, tidak sedikit komunitas-komunitas

dengan identitas yang berbeda dari mayoritas penduduk suatu bangsa memutuskan untuk memisahkan diri dari ikatan nasional mereka. Bahkan, tidak sedikit yang kemudian mengangkat senjata melawan pemerintah pusat.

Gerakan separatis yang memilih jalan kekerasan dengan melawan pemerintah pusat pada umumnya disebabkan oleh tumpukan rasa takut dan benci terhadap tindakan represif pemerintah pusat.⁷ Tindakan pemerintah New Delhi dimasa Perdana Menteri Indira Gandhi yang cenderung represif dan brutal menumbuhkan rasa takut dan kebencian sedemikian kuat di kalangan kaum Sikh. Demikian pula tindakan represif pemerintah Turki terhadap Suku Kurdi yang tak bersedia menghilangkan bahasa dan budaya mereka membuat rasa takut dan kebencian sedemikian meluap di kalangan Suku Kurdi garis keras.

Dalam konflik bersenjata antara kelompok minoritas dan aparat keamanan pemerintah pusat pada umumnya terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang luar biasa. Namun, sebagaimana pemerintah-pemerintah negara berkembang pada umumnya, mereka tidak pernah bersedia mengakui adanya pelanggaran hak azasi manusia tersebut. Mereka selalu berlindung di balik istilah *integrasi* dan *disintegrasi*. Buat pemerintah India dan Turki, tindakan-tindakan brutal terhadap Kaum Sikh dan Kurdi dilakukan berdasarkan pertimbangan integrasi nasional.

Sebaliknya, mereka menuduh gerakan kaum minoritas tersebut sebagai

bagian dari gejala disintegrasi nasional. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan semata-mata untuk memelihara keutuhan bangsa dari ancaman disintegrasi nasional. Alasan semacam ini pula yang kemudian juga dilakukan oleh pemerintah Suharto dalam mempertahankan Timor Timur dan Aceh.

Ketidakadilan barangkali merupakan kata kunci untuk menjelaskan gejala separatis di berbagai belahan dunia ini. Ketidakadilan dilakukan baik oleh negara super power terhadap negara kecil. Ketidakadilan juga dibenarkan oleh tindakan negara kecil terhadap minoritas di negerinya. Jika negara besar menggunakan istilah anti-komunisme untuk melakukan tindakan-tindakan tak beradab, dan sekarang menggunakan istilah antiterorisme untuk mengulang kembali tindakan yang tak beradab. Maka negara kecil seperti India, Turki, Indonesia, dan Cina menggunakan istilah separatis untuk melancarkan tindakan tak berperikemanusiaan dalam mempertahankan apa yang mereka sebut sebagai pemeliharaan integrasi nasional. Apakah pemeliharaan integrasi nasional dengan cara-cara yang brutal masih dapat dibenarkan? Apakah tindakan semacam ini bukan kemudian justru menjadi pendorong bagi tumbuhnya gerakan separatis?

Faktor Eksternal

Bagaimana pengaruh faktor eksternal terhadap gerakan separatis? Faktor eksternal berupa campur tangan negara lain, khususnya negara besar bersifat tidak menentu dan tergantung pada posisi strategis negara bersangkutan dan kepentingan negara besar terhadap negara tersebut. Sejenis gerakan separatisme paling mutakhir yang berhasil adalah kasus Timor

⁷ John R. Bowen, "The myth of Global Ethnic Conflict," *Journal of Democracy*, vo.7, No. 4, October 1996.

Timor. Walaupun tidak terlalu tepat disebut separatisme tapi jelas bahwa Timor Timur dapat mewujudkan *the rights for self-determination* (hak menentukan nasib sendiri) setelah selama lebih dari 15 tahun berada di bawah pemerintahan militer yang keras.

Pada tahun 1975, Amerika adalah pendukung utama invasi Indonesia ke Timor Timur karena alasan anti-komunisme yang dikembangkan pemerintah Suharto. Bahkan, pemerintah Amerika mensuplai senjata yang digunakan ABRI dalam operasi penumpasan kekuatan anti-integrasi di Timor Timur. Sepanjang Perang Dingin Amerika menganggap kasus Timor Tiinur sebagai urusan dalam negeri Indonesia. Setelah Perang Dingin berakhir dan Clinton mendukung gerakan hak azasi manusia, kebijakan Amerika terhadap Timor Timur berubah. Sejak 1993-1999 Amerika menentang pelanggaran HAM di Timor Timur.⁸ Bahkan ketika Indonesia dilanda krisis Amerika mendukung PBB untuk melaksanakan jejak pendapat hingga Timor Timur memperoleh kemerdekaan. Sukses Timor Timur sebagian besar karena besarnya perhatian pendapat umum di Amerika, kalangan Kongres, dan timing yang tepat (Indonesia lemah karena dilanda krisis moneter).

Kasus separatisme di Punjab, dan daerah-daerah lain di India, pada umumnya dianggap pemerintah Amerika sebagai urusan dalam negeri India. Oleh karena itu, pemerintah Amerika tidak merasa perlu melakukan intervensi. Demikian pula kasus Quebec di Canada yang hingga kini tetap

dianggap pemerintah Amerika sebagai urusan dalam negeri Canada.⁹

Gerakan separatisme Kurdi di Turki tidak seberuntung Timor Timur. Pendapat umum di Amerika dan Eropa sama sekali tidak peduli dengan penderitaan yang dialami Suku Kurdi karena tindakan represif sistematis aparat keamanan Turki. Amerika sendiri juga segan menekan Turki, walaupun sesungguhnya sangat mampu, karena dua alasan. Pertama, Turki adalah anggota NATO sehingga Amerika tidak akan mudah melakukan tekanan diplomasi yang terlalu keras. Kedua, Turki dianggap sebagai benteng bagi gerakan Islam fundamentalis yang sudah tentu diperlukan Amerika.¹⁰

Strategi Menghadapi Separatisme

Gerakan separatisme sangat bervariasi akan tetapi pada umumnya ditandai dengan kehendak untuk mewujudkan identitas diri. Namun, gerakan separatisme paling kuat adalah gerakan yang menuntut hak menentukan nasib sendiri. Dewasa ini hak menentukan nasib sendiri tampaknya masih tetap menjadi salah satu tujuan gerakan-gerakan tertentu di dunia. Hak menentukan nasib sendiri Bangsa Timor Timur tampaknya menjadi salah satu idola bagi kebanyakan gerakan separatis lain. Aceh, Chechnya, Kosovo, Kurdi, Nagorno-Karabakh, Sikh dan sederet gerakan separatisme belahan dunia sudah tentu merupakan bukti betapa harapan untuk mewu-

⁸ Bambang Cipto, *Kebijakan Hak Azasi Presiden Clinton Terhadap Indonesia, 1993-1997*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, September 2002.

⁹ Strobe Talbott, 2000, *Self Determination in An Interdependent World*, "Foreign Policy, Spring.

¹⁰ Eileen F. Babbitt, *Ethnic Conflict and the Pivotal State*, dalam Chase (et. al). hal. 351.

judkan menentukan nasib sendiri masing menjadi harapan komunitas-komunitas kecil dunia. Mereka bergerak karena merasa ditindas, diperlakukan tidak adil, dicabut hak-hak azasinya pada saat puluhan bangsa-bangsa di seluruh dunia yang sedang menghirup hawa demokrasi.

Beberapa negara relatif berhasil mengendalikan gerakan separatisme yang melanda kelangsungan hidup berbangsa mereka. Menurut Larry Diamond bahwa India dan Papua Nugini merupakan dua negara yang paling kaya dengan ancaman gerakan separatisme. Namun, kedua negara ini juga dikenal mampu mengembangkan strategi untuk mengurangi kebencian daerah terhadap pusat melalui serangkaian negosiasi dan akomodasi. Sebagai misal, ketika India terancam oleh konflik yang akan berujung pada polarisasi bangsa karena kebijakan bahasa nasional maka pemerintah India memutuskan untuk memberi kebebasan kepada masing-masing negara bagian untuk memberlakukan bahasa negara bagian masing-masing. Hingga kini terdapat sekitar 14 bahasa resmi dan hanya separuh dan wilayah India yang menggunakan bahasa Hindi sebagai resmi sehari-hari. Dalam kesempatan lain India menambah jumlah negara bagian untuk meredam separatisme di daerah. Demikian pula Papua Nugini yang kemudian memperbanyak propinsi sehingga konflik berdarah dan kecenderungan separatisme dapat ditanggulangi.¹¹

Beberapa negara di Eropa telah cukup lama mengembangkan strategi menghadapi ancaman separatisme yang melanda negara-negara berkembang

paska PD II. Belgia sebagai misal, telah lama mengembangkan *federalisme non-teritorial*. Model federalisme ini dikembangkan untuk menghadapi potensi ancaman separatisme karena perbedaan budaya yang sangat menyolok dalam masyarakat Belgia. Dengan membentuk dewan budaya di Parlemen Belgia maka komunitas yang berbeda bahasa dan budaya dapat mewujudkan perbedaan tersebut secara konstitusional di tingkat legislatif. Dengan kata lain, konflik dikelola melalui lembaga dengan nuansa budaya yang sangat kuat sehingga mereduksi potensi ancaman komunitas yang dapat membahayakan integrasi bangsa.

Sampai tingkat tertentu demokrasi mampu mewartakan konflik-konflik di masyarakat yang dapat berujung pada separatisme. Akan tetapi, demokrasi baru juga mengundang potensi separatisme. Tuntutan daerah yang meluas paskagerakan reformasi di Indonesia adalah bukti bahwa transisi menuju demokrasi dapat mengundang ancaman disintegrasi.

Di tengah transisi menuju demokrasi ini sudah barang tentu Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan termasuk potensi ancaman separatisme, khususnya di Aceh dan Ambon. Sebagai bagian dari masyarakat dunia harus diakui bahwa gejala tersebut sangat, universal karena menyangkut kemampuan pemerintah dalam mewujudkan sistem politik yang terbuka dan demokratis. Dengan mengkaji pengalaman negara lain, sesungguhnya ancaman separatisme dan solusi yang dilakukan untuk menanggulangnya merupakan bagian dan proses besar demokratisasi. Hal ini berarti bahwa dengan menjadikan ancaman tersebut sebagai bagian dari proses perubahan politik, dan bukan sesuatu yang menyimpang dari proses,

¹¹ Larry Diamond, "Introduction," dalam Diamond (et. al), Vol. 3, hal. 20.

maka cara-cara yang digunakan untuk mencapai penyelesaian pun sudah semestinya mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi.

Bila logika ini yang dijadikan sebagai sandaran, penyelesaian atas kasus Aceh maupun Ambon perlu dilakukan dengan menetapkan prinsip tanggap terhadap semua warganegara.¹² Sebaliknya, bila elit hanya tanggap terhadap segelintir kepentingan elit semata-mata dan tidak menerapkan prinsip di atas maka separatisme akan tetap mengganggu kelancaran proses demokrasi. Instabilitas politik akan terganjal dan pertumbuhan ekonomi pun akan terimbas oleh berbagai jenis kekerasan politik yang muncul.

Dalam proses belajar ini sudah barang tentu banyak kesalahan yang akan diperbuat. Namun, kebesaran sebuah bangsa terletak pada sikap jujur, sikap bijak, dan sikap adil dari para pemimpin-pemimpinnya. *Leadership* menjadi utama dalam menghadapi potensi separatisme di Indonesia sebagaimana di negara-negara lain. Separatisme akan tetap muncul dan tak akan segera lenyap, sebagaimana di berbagai belahan dunia lain, selama para pemimpin bangsa belum mewujudkan ketiga sikap terpuji di atas secara konsekwen dan terus-menerus.●

Daftar Pustaka

- Bambang Cipto. 2002. *Kebijakan Hak Azasi Presiden Clinton Terhadap Indonesia, 1993-1997*. Disertasi, Universitas Gadjah Mada, September.
- Craig Baxter, Yogendra K. Malik, Charles H. Kennedy, and Robert C. Oberst, 1986, *Government and Politics in South Asia*, Westview Press.
- David McDowall. 1992. "The Kurdish Question," dalam *The Kurds: A Contemporary Overview*, diedit oleh P.G. Kreyenbroek and S. Sperl, London and New York: Routledge Press. hal. 32.
- Eileen F. Babbitt, "Ethnic Conflict and the Pivotal State," dalam Chase (et. al).
- John R. Bowen, "The myth of Global Ethnic Conflict," *Journal of Democracy*, vo.7, No. 4, October 1996.
- Larry Diamond, Juan J. Linz, and Seymour Martin Lipset. 1989. *Democracy in Developing Countries: Asia Volume Three*, Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishes.

¹² Robert A. Dahl. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press.

- Larry Diamond, Juan J. Linz, and Seymour Martin Lipset. 1989. *Democracy in Developing Countries: Asia Volume Four*, Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishes.
- Michael M. Gunter. 1994. *The Changing Kurdish Problem in Turkey*, London, Research Institute for the study of Conflict and Terrorism.
- Robert A. Dahl. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press.
- Stephen P. Cohen and Sumit Ganguly. 1999. "India," dalam *The Pivotal States: A New Framework for U.S. Policy in the Developing World*, diedit oleh Robert Chase, Emily Hill, and Paul Kennedy, New York: W.W. Norton & Company, hal. 44.
- Strobe Talbott. 2000. "Self Determination in An Interdependent World," *Foreign Policy*, Spring.

